

**ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI PEMANGKU
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT, BIRO UMUM,
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Disusun Oleh:

NAMA : ROMLI
NPM : 1964001022
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022**


**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS


Nama : Romli
NPM : 1964001022
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Penempatan Pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Judul tesis (Bahasa Inggris) : Employee Placement Analysis of Functional Positions in Public Works and Public Housing, Bureau of Public Affairs, Secretariat General, Ministry of Public Works and Public Housing

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I


(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd)

Pembimbing II


(Dr. Edy Sutrisno, SE., M.Si)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

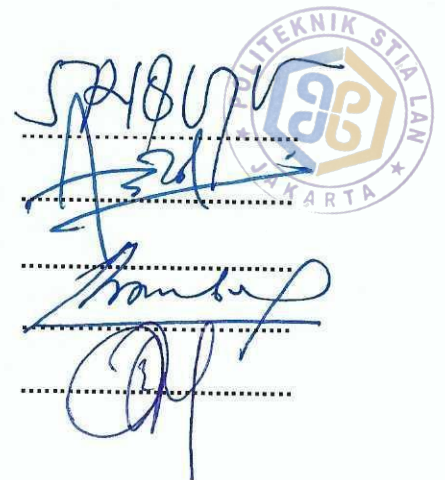
NAMA : ROMLI
NPM : 1964001022
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
JUDUL TESIS : ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI
PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, BIRO UMUM,
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Desember 2022
Pukul : 13.30

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si. :
Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si. :
Anggota : Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D. :
Pembimbing 1 : Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd. :
Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si. :



The image shows a circular official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta on the right side of the page. The stamp contains the text 'POLITEKNIK STIA LAN' at the top and 'JAKARTA' at the bottom, with a central logo. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines that serve as a guide for the placement of the signatures.

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romli
NPM : 1964001022
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Analisis Penempatan Pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2022

Peneliti,



ROMLI

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun tesis ini dengan judul “Analisis Penempatan Pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.” Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi ujian Pascasarjana pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam segala sisi ke dalam bentuk tulisan. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini peneliti menyampaikan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini dan Bapak Dr. Edy Sutrisno, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Isteriku Tercinta Hj. Yayat Ruyati sebagai motivator peneliti melanjutkan kuliah ini;
3. Putra dan Putri kesayangan peneliti: Ananda Dini Atshilah, Ananda Praditia Salim dan Ananda Divia Nuramandanti sebagai motivator peneliti melanjutkan kuliah ini;
4. Keluarga peneliti: adik tercinta Hj. Ida Rosidah serta Keluarga Besar peneliti tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun material yang tak terhingga bagi peneliti;
5. Sahabat peneliti: Pri Budiarti Rini Sejati Soeparto yang senantiasa memberikan doa dan motivasi untuk peneliti;

6. Seluruh dosen yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan kuliah Program Studi Administrasi;
7. Pembangunan Negara Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur di Politeknik STIA LAN Jakarta;
8. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan pegawai Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk peneliti;
9. Bapak Agus Sutamin, S.Sos, M.Si., Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Ibu Dra. Canka A.S. Putri, M.A., Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Subkoordinator, dan teman-teman Bagian Prasarana Fisik, Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum, Sekretariat Jenderal, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan yang membantu memberikan data/bahan penelitian tesis ini serta memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian penyusunan tesis ini;
12. Rekan-rekan di Politeknik STIA LAN Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur di Politeknik STIA LAN Jakarta Angkatan Tahun 2019 yang telah memberikan doa dan *support*-nya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan karena itu peneliti selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kelengkapan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Jakarta, Desember 2022

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Romli, Bambang Giyanto, Edy Sutrisno

romlimurtaba@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa penempatan bagi pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Unit Kerja Biro Umum tidak dilakukan sesuai kapasitasnya. Hal ini terjadi karena belum adanya persiapan yang baik dalam proses penyetaraan jabatan. Penelitian ini bertujuan agar dapat mendeskripsikan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta menyusun strategi penempatan yang sesuai dengan Jabatan Fungsional Bidang PUPR yang diembannya, sehingga bisa bekerja dengan optimal dan mendapatkan angka kredit yang tepat waktu atau lebih cepat sesuai dengan target jabatan fungsionalnya. Metode yang digunakan ialah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen serta menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penempatan tidak dilakukan sesuai tugas pokoknya karena adanya penyetaraan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Promosi Jabatan Fungsional Bidang PUPR, Pengisian Jabatan pada Unit Kerja Biro Umum belum sesuai dengan *job description*-nya dikarenakan pejabat yang bersangkutan ketika diangkat sebagai Jafung Bidang PUPR melalui penyetaraan belum mengikuti diklat dengan kriteria Metodologi, Teknik Analisis, Teknik dan prosedur kerja yang di dasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, yang dilaksanakan dalam waktu kerja efektif dalam 1 (satu) tahun. Transfer (alih tugas/mutasi) belum dilakukan sesuai dengan tugas pokoknya. Disarankan segera menambah jumlah Jabatan Fungsional Bidang PUPR, menyelenggarakan diklat terkait maupun webinar, uji kompetensi, pelatihan publikasi ilmiah, sertifikasi ilmiah menyesuaikan komposisi dengan menambah jumlah Jabatan Fungsional PUPR di luar Bidang PUPR. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan lebih mendalam oleh peneliti lain fokus pada Demosi (Penurunan Jabatan) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kata kunci: penempatan; pejabat fungsional; promosi; transfer, strategi

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PLACEMENT OF EMPLOYEES OF FUNCTIONAL POSITIONS IN THE FIELD OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING, GENERAL BUREAU, SECRETARIAT GENERAL, MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING

Romli, Bambang Giyanto, Edy Sutrisno

romlimurtaba@gmail.com

The National Institute of Public Administration (NIPA) Jakarta

The background of this research is a fact that the placement of employees of the Functional Positions in Public Works and Public Housing (PUPR) in the Public Bureau Work Unit is not carried out according to their capacity. This happens because there is no proper preparation in the process of equalizing positions. This study aims to be able to describe the suitability of the main tasks and functions and to develop a placement strategy that is in accordance with the PUPR Functional Position it holds, so that they can work optimally and get credit scores on time or faster according to the target functional position. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection is done through interviews, observation, document review and triangulation. The results showed that placement is not carried out according to their main duties because there is an equalization that must be carried out by the Ministry of PUPR. Promotion of Functional Positions in the PUPR Sector, Filling in Positions in the General Bureau Work Unit is not in accordance with the job description because the official concerned when appointed as Head of the PUPR Sector through equalization has not attended training with the criteria of Methodology, Analysis Techniques, Techniques and work procedures based on certain scientific and/or technical training with certification, carried out in effective working time within 1 (one) year. In addition, they have not received maximum information for the process of developing this motivation. Transfers (assignments/transfers have not been carried out in accordance with their main duties. It is recommended that to immediately increase the number of Functional Positions in the PUPR Sector by holding related training and webinars, competency tests, scientific publication training, scientific certification to adjust the composition by increasing the number of PUPR Functional Positions besides the PUPR Sector. Further research is needed in more depth by other researchers for Demotion and Termination of Employment.

Keywords: placement; functional officer; promotion; transfer; strategy.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Permasalahan	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	16
C. Kerangka Berpikir	59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Metode Penelitian	61
B. Teknik Pengumpulan Data	61
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	68
B. Hasil dan Analisis Penelitian.....	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	110
A. Simpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Jabatan Fungsional Tertentu	2
Tabel 1.2 Surat Keputusan Jabatan Fungsional Bidang PUPR.....	5
Tabel 1.3 Nominasi Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional	7
Tabel 1.4 Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Daftar Key Informan	63
Tabel 3.2 Daftar Telaah Dokumen	65
Tabel 4.1 Daftar Penempatan Jabatan Fungsional Bidang PUPR	74
Tabel 4.2 Data Pendidikan Jabatan Fungsional Bidang PUPR	75
Tabel 4.3 Data Promosi Jabatan Fungsional Bidang PUPR.....	77
Tabel 4.4 Kriteria Jabatan Fungsional Bidang PUPR	82
Tabel 4.5 Data Diklat Pemangku Jabatan Fungsional Bidang PUPR	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	60
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Biro Umum.....	69
Gambar 4.2	Gedung Utama Kementerian PUPR.....	70
Gambar 4.3	Komposisi SDM Biro Umum... ..	72
Gambar 4.4	Komposisi SDM Biro Umum menurut Jabatan.....	72
Gambar 4.5	Komposisi SDM Biro Umum menurut Pendidikan.....	73
Gambar 4.6	Kriteria Promosi Jabatan Fungsional Bidang PUPR ..	79
Gambar 4.7	Struktur Organisasi dengan menghapus eselon.....	81
Gambar 4.8	Perbedaan Tugas, Unsur Kompetensi, dan Kegiatan antara JPT, JF dan JA.....	89
Gambar 4.9	Pengembangan Karier ASN melalui Jabatan Fungsional	90
Gambar 4.10	Alur Perpindahan Jabatan dan <i>Infasing</i>	91
Gambar 4.11	Identifikasi Peran Jabatan Fungsional berbasis Fungsi Utama Organisasi.....	95
Gambar 4.12	Identifikasi Pembentukan Jabatan Fungsional Baru.....	104

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
2. Pedoman Wawancara dengan *Key Informan*
3. Pedoman Wawancara dengan Pejabat Struktural
4. Transkrip Wawancara dengan *Key Informan*
5. Transkrip Wawancara dengan Pejabat Struktural
6. Pedoman Observasi Penelitian
7. Hasil Observasi Penelitian
8. Pedoman Telaah Dokumen
9. Hasil Telaah Dokumen
10. Daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Indikator Kinerja Individu (IKI), dan Tupoksi Pelaksanaan Pekerjaan Pemangku Jabatan Fungsional Bidang PUPR
11. Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Bidang PUPR Tahun 2019 sampai dengan 2021
12. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian
13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Jabatan Fungsional diarahkan agar pejabat fungsional menjadi motor penggerak (*engine*) organisasi, namun masih banyak permasalahan yang menyangkut jabatan fungsional diantaranya Penempatan tidak sesuai dengan kefungsinya, sehingga sulit mendapatkan angka kredit dan dalam tugas dan fungsi organisasi belum secara eksplisit tertuang peran jafung. Pejabat fungsional bersifat penugasan yang mengacu pada visi dan misi program dan kegiatan tetapi masih menjadi persoalan/masalah mengingat masih adanya struktural terendah yang secara substansi mengerjakan tugas tersebut. Pengembangan jabatan fungsional masih belum optimal antara lain menyangkut pengembangan dan peningkatan kompetensi, mendorong ke arah spesialisasi jabatan fungsional, peningkatan pengembangan profesi, mendorong unit pembina jafung untuk melengkapi pengaturan jafung melalui Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), meningkatkan kinerja jafung dalam pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Pembinaan pejabat fungsional di masing-masing sektor belum optimal karena belum sepenuhnya memahami peran unit kerja pembina pejabat fungsional. Penggunaan sistem informasi untuk jabatan fungsional sangat penting, terutama untuk kemudahan akses informasi tentang kondisi (status penempatan/penugasan), progres/kinerja pejabat fungsional dan lebih utama lagi

adalah tersedianya sistem aplikasi pengusulan dan penetapan angka kredit.

Kementerian PUPR sebagai sebuah kementerian teknis yang fokus pada pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan ahli di bidangnya. Keterampilan dan keahlian tersebut secara profesional bila dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan akan memberikan dampak signifikan, sehingga jabatan yang ada di Kementerian PUPR adalah diarahkan kepada jabatan yang sesuai fungsinya atau jabatan fungsional (jafung).

Tabel 1.1

Perbandingan Jabatan Fungsioanal Tertentu Unit Kerja Biro Umum dengan Unit Organisasi Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jumlah Pejabat JFT Biro Umum	Jumlah Pejabat JFT Kementerian PUPR
1	Teknik Jalan dan Jembatan	3	1938
2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	3	887
3	Pembina Jasa Konstruksi	1	244
4	Arsiparis	20	270
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	313
6	Analisis SDM Aparatur	1	116
7	Pranata Komputer	2	97
8	Pranata Humas	3	93
9	Pranata Komputer	2	97
10	Dokter Umum	5	5
11	Dokter Gigi	8	8
12	Pranata Laboratorium Kesehatan	3	3
13	Perawat	4	4
14	Perawat Gigi	2	2
	Jumlah Pejabat	58	4.080

Sumber : e-HRM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada Tabel 1.1 di lingkungan Unit Kerja Biro Umum Terdapat 14 Jabatan Fungsional Tertentu dengan jumlah Pejabat sebanyak 58 Pegawai memangku

Jabatan Fungsional Tertentu Tersebut. Pemangku Jabatan terbanyak adalah Jabatan Fungsional Arsiparis dikarenakan Biro Umum Pembina Jafung Arsiparis di lingkungan Kementerian PUPR, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu terbanyak ke 2 adalah Jabatan Fungsional Dokter dan Jabatan Fungsioanal Dokter Gigi dikarenakan Kementerian PUPR mempunyai Klinik sendiri setara Poliklinik Pratama yang dikelola Bagian Rumah Tangga Biro Umum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai 5 Jabatan Fungsional Bidang PUPR yaitu:

1. Teknik Jalan dan Jembatan.

Dasar: KEPMENKOWASBANGPAN Nomor 64/KEP/MK. WASPAN/ 10/ 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 dan Keputusan Bersama Nomor 02/SKB /M/2000 serta Nomor 167.B Tahun 2000 Tanggal 1 November 2000.

2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

Dasar: KEPMENKOWASBANGPAN Nomor 65/KEP/ MK.WASPAN/ 10/ 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 dan Dasar: Keputusan Bersama Nomor 03/SKB/M/2000 serta Nomor 157.c Tahun 2000 Tanggal 1 November 2000.

3. Pembina Jasa Konstruksi.

Dasar: PERMENPAN RB Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Bina Konstruksi.

4. Teknik Penyehatan Lingkungan.

Dasar: KEPMENKOWASBANPAN Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/ 10/ 1999 Tanggal 1 Oktober 1999.

Dasar: Keputusan Bersama Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000.

5. Teknik Pengairan.

Dasar: KEPMENKOWASBANPAN Nomor 63 KEP/MK.WASPAN/10/ 1999
Tanggal 1 Oktober 1999 dan Dasar: Keputusan Bersama Nomor: 01
/SKB/M/2000 dan Nomor 157-D Tahun 2000 Tanggal 1 November 2000

Dalam perkembangannya, Penempatan Jabatan Fungsional Bidang PUPR dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang otomatis diangkat sebagai pejabat fungsional Bidang PUPR, Kebutuhan unit kerja dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal dengan CPNS belum memenuhi kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal yang sangat beraneka ragam, begitu juga pejabat struktural yang beralih ke jabatan fungsional secara penyetaraan, tugas dan fungsinya belum sejalan dengan jabatan yang diembannya sebagai pejabat subkoordinator dan pekerjaan sehari harinya lebih banyak mengerjakan pekerjaan jabatan rangkapnya sebagai subkoordinator sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan angka kredit dan proses kenaikan pangkat sesuai aturan sebagai pejabat fungsional Bidang PUPR. Faktanya bahwa penempatan bagi pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Unit Kerja Biro Umum tidak dilakukan sesuai kapasitasnya. Hal ini terjadi karena belum adanya persiapan yang baik dalam proses penyetaraan jabatan.

Mengutip tulisan Danny Bastian (2007) mengemukakan bahwa “Jabatan Fungsional dari satu sisi telah membawa angin segar bagi segelintir PNS untuk berprofesi (melalui JF), sekaligus lagi-lagi dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan J F”. Isu-isu yang mengganjal dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional adalah:

- a) Pedoman JFT belum dipahami sebagaimana yang diharapkan;
- b) Masih ada simpulan "minor" tentang Jabatan Fungsional;
- c) Penempatan yang tidak sesuai antara jabatan fungsioanal tertentu dengan penempatan;
- d) Rasa minder oleh pejabat fungsional dan mekanisme serta hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional;
- e) Satu lagi masalah signifikan yang dihadapi oleh sebagian besar JF adalah tidak adanya tanggung jawab otoritas dan sedikit penugasan aset untuk membantu pelaksanaan otoritas praktis tertentu. Berbagai persoalan lain menyangkut ASN saling berkaitan dan kompleks.

Tabel 1.2

Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional yang tidak sesuai dengan penempatan dan butir tugas pokok Jabatan Fungsional Bidang PUPR

No	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Tugas Pokok Jabfung	Tugas Harian
1.	1504/KPTS/SJ/2020	10 Juni 2020	Melaksanakan penyelenggaraan tatabangunan, perumahan dan permukiman	Subkoordinator Pelaksana Tugas Utilitas
2.	1505/KPTS/SJ/2020	10 Juni 2020	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	Subkoordinator Pelaksana Tugas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan
3.	1506/KPTS/SJ/2020	10 Juni 2020	Melaksanakan penyelenggaraan, tata bangunan, perumahan dan Permukiman	Subkoordinator Pelaksana Tugas Sarana dan Prasarana Lingkungan

4.	023/KPTS/SP/JF/2019	15 Mei 2019	PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi	Pengelola Keuangan
5.	006/KPTS/SP/JF/2019	15 Mei 2019	Melaksanakan Penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan	Pengolah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
6.	009/KPTS/SP/JF/2019	15 Mei 2019	Melaksanakan Penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan	Pengolah Data dan Informasi
7	015/KPTS/SP/JF/2019	15 Mei 2019	Melaksanakan Penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan	Pengolah Data dan Informasi

Sumber: Subbagian Tata Usaha Biro Umum

Penugasan yang tidak sesuai dengan butir-butir pekerjaannya sebagai Pejabat Fungsional Bidang PUPR berimbas pada Kenaikan pangkat yang tidak tepat waktu atau sesuai dengan standar Jabatan Fungsional Bidang PUPR yang

seharusnya, Pejabat Fungsional tersebut tidak bisa mengumpulkan Angka Kredit atau mendapatkan Penetapan Angka Kredit dari Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Bidang PUPR tepat pada waktunya sesuai standar Jabatan Fungsional, sehingga menghambat proses kenaikan pangkat yang seharusnya bisa 2 atau 3 tahun menjadi 4 atau 5 tahun.

Tabel 1.3
Nominasi Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Bidang PUPR per 1 April 2022 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak dapat mengajukan Penetapan Angka Kredit

NO	Inisial Nama	NIP	Gol.	TMT Gol.	MKG	Jabatan	Status
1.	A	1975XXXX2010012007	III/c	01-04-2018	11 Tahun 11 Bulan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	TMS
2.	B	1987XXXX2009121001	III/c	01-04-2018	12 Tahun 02 Bulan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	TMS
3.	D	1995XXXX2018022001	III/a	01-02-2019	03 Tahun 10 Bulan	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	TMS

Sumber : Data e-HRM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Perkembangannya sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan,

Teknik Penyehatan Lingkungan, dan Pembina Jasa Konstruksi, telah melakukan perubahan regulasi Jabatan Fungsional Bidang PUPR sesuai PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang PUPR menjadi 10 (sepuluh) Jabatan. Jabatan Fungsional Bidang PUPR tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Data Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang PUPR

No.	Nomenklatur JF Lama	Nomenklatur JF Baru	Permen PANRB
1.	Pembina Jasa Konstruksi (kategori keahlian)	1. Pembina Jasa Konstruksi (tetap)	1. PermenpanRB Nomor 51 Tahun 2021
2.	Teknik Pengairan (kategori keahlian dan keterampilan)	2. Pengelola Sumber Daya Air (kategori keahlian) 3. Penata Laksana Sumber Daya Air (Kategori keterampilan)	2. PermenpanRB Nomor 79 Tahun 2021 3. PermenpanRB Nomor 80 Tahun 2021
3.	Teknik Jalan dan Jembatan (kategori keahlian dan keterampilan)	4. Penata Kelola Jalan dan Jembatan (kategori keahlian) 5. Penata Laksana Jaandan Jembatan (Kategori Keterampilan)	4. PermenpanRB Nomor 81 Tahun 2021 5. PermenpanRB Nomor 82 Tahun 2021
4.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (kategori keahlian dan keterampilan)	6. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman (kategori keahlian) 7. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman (kategori keterampilan) 8. Penata Kelola Perumahan (kategori keahlian)	6. PermenpanRB Nomor 83 Tahun 2021 7. PermenpanRB Nomor 84 Tahun 2021 8. PermenpanRB Nomor 87 Tahun 2021

5.	Teknik Penyehatan Lingkungan (kategori keahlian dan keterampilan)	9. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan (kategori Keahlian)	9. PermenpanRB Nomor 85 Tahun 2021
		10. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan (kategori keterampilan)	10. PermenpanRB Nomor 86 Tahun 2021

Sumber: Subbagian Tata Usaha Biro Umum

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diangkat pertama kali sebagai Pejabat Fungsional Bidang PUPR (JFT), tetapi penempatannya belum sesuai dengan jabatan fungsional yang diembannya.
2. Penyetaraan/*Inpassing* dari eselon IV dan eselon III ke Jabatan Fungsional Bidang PUPR, beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional Bidang PUPR, tetapi butir-butir dan tugas pokoknya lebih banyak mengerjakan tugas jabatan rangkap sebagai subkoordinator.

C. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa penempatan jabatan fungsional Bidang PUPR belum sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Pejabat Fungsional Bidang PUPR yang diembannya?
2. Bagaimana Strategi yang digunakan organisasi dalam penempatan pejabat fungsional Bidang PUPR?

D. Tujuan Penelitian

Bertumpu pada rumusan permasalahan itu maka maksud dari dilaksanakannya kajian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian Tupoksi Jabatan Fungsional Bidang PUPR di Unit Kerja Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR.

2. Menyusun Strategi penempatan yang sesuai dengan Jabatan Fungsional Bidang PUPR yang diembannya sehingga bisa bekerja dengan maksimal dan mendapatkan angka kredit yang tepat waktu atau lebih cepat sesuai dengan target jabatan fungsionalnya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Aspek Akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan dokumen perguruan tinggi untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan sekaligus dapat menjadi acuan, referensi maupun bahan rujukan ilmiah dalam menganalisis pembinaan kepegawaian bagi praktisi pendidikan maupun peneliti.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi sebagai masukan dan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan pembinaan kepegawaian khususnya Pejabat Subkoordinator, Pejabat Fungsional Bidang PUPR dan Pejabat Pelaksana pada umumnya, selain itu menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terkait masalah Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Jabatan Fungsional.